

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN SERANG**

**Jumanah, Hernawati**  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Corresponden Author Email: [jumanah1011@gmail.com](mailto:jumanah1011@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemerintah Desa Kareo membentuk pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes, yaitu sebagai motor penggerak ekonomi di desa, namun dalam pembentukannya masih minim pembinaan dari pemerintah daerah sehingga muncul beberapa permasalahan, yang menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes diantaranya keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan khususnya persampahan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Kurangnya sosialisasi dari pengurus BUMDes kepada masyarakat. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hasil Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan dengan baik, di sebabkan oleh: 1. Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mendukung adanya program tersebut. 2). Sumber daya manusia yang masih kurang karena dari pengurus hanya ada pengurus inti saja. 3). Karakteristik agen pelaksana yaitu masih banyaknya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes. 4). Sikap atau kecenderungan para pelaksana sikap yang dilakukan oleh pelaksana baik, akan tetapi dari program tersebut tidak ada jadwal rutin setiap bulannya. 5). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu melalui Whatsapp group saja. Tidak dilakukan pertemuan rutin setiap bulannya dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham terhadap program tersebut. 6). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan penghasilan yang didapat.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Program Pengelolaan Sampah, BUMDes*

## PENDAHULUAN

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintahan membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memanyungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari Undang-Undang No. 39 tahun 2010 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan BUMDes itu sendiri.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah tersebut terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah

bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan desa Kareo bersih terhindar dari timbulan sampah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat melakukan pemilahan dan penanganan sampah hingga timbulan sampah berkurang sebelum dibuang ke TPS dan TPA. Perubahan pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah daerah cara 3R, yaitu reduce (mengurangi volume), reuse (mengggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo ini bukan tanpa hambatan, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Setelah peneliti melakukan observasi lapangan mengenai Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terindikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam. Keterbatasan modal merupakan kelemahan

utama dalam menjalankan kegiatan BUMDes. **Kedua**, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan khususnya persampahan. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, terkadang masyarakat seringkali melimpahkan tugasnya ke orang lain dan tukang sampah padahal sudah menjadi kewajiban mereka untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat tersebut. **Ketiga**, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seperti armada pengangkut sampah, mesin pengolah sampah, tempat pembakaran dan pembuatan kompos, tempat penampungan disetiap RW atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), dengan kurangnya fasilitas ini tentu akan menghambat kinerja pegawai dan memproduksi dari hasil sampah yang ada di desa kareo untuk mengelola sampah itu sendiri. Dan untuk itu pengelolaan sampah yang ada di desa kareo masih menggunakan fasilitas atau alat dengan seadanya. **Keempat**, sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah, karena masyarakatnya tidak ada rasa ingin memiliki atau mengoleksi kerajinan dari olahan sampah tersebut. Sehingga mempengaruhi daya minat dari orang lain, dan juga belum adanya kerjasama dari pemerintah dan pihak swasta. **Kelima**, kurangnya sosialisasi dari pengurus BUMDes kepada masyarakat, menjadi titik lemah dari pengelola sampah ini. Sehingga masyarakat kurang menyadari akan pentingnya mengelola sampah. Karena kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat akan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan dilapangan

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi Negara, tetapi sifatnya multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Berikut ini disajikan beberapa definisi dari kebijakan publik. Pengertian kebijakan menurut friedrich dalam Agustino (2012:7) sebagai berikut:

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan kegiatan yang tidak jauh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari untuk sebagai landasan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Suharto (2013:3) mengatakan:

“Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh

pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara”.

Menurutnya, kebijakan merupakan hal yang luas yang menyangkut pemerintah dan public, dimana hal tersebut mengatur sedemikian rupa kehidupan di suatu pemerintahan.

#### **B. Implementasi Kebijakan**

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, (2012: 75) selanjutnya dalam memahami implementasi kebijakan yaitu:

“Implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah sesuai program di laksanakan atau dirumuskan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha untuk pengadministrasiannya,

maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat”.

Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2010).

Salah satu model implementasi adalah model Donald S. Van Metter dan Carl VanHorn Agustino dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2016:133) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2016:133). (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosial-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (2) Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan

proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdayasumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdayasumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut. (3) Karakteristik AgenPelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. (4) Sikap atauKecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahn akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi;

serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

### C. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbul sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengelolaan dan pembuangan akhir (Sejati, 2009:24).

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut Enri Damanhuri dan Tri Padmi (2019: 139) pengelolaan sampah terpadu adalah untuk menerapkan program daurulang dan proses pengolahannya di tempat pengolahan dan di TPA di kenal sebagai pengelolaan sampah terpadu. Konsep ini prinsipnya memadukan kegiatan pengelolaan/pengurukan di TPA dengan kegiatan proses pemilahan, daur ulang, komposting dan upaya lainnya agar sampah yang akan diuruk menjadi lebih sedikit.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Disamping itu penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi saat ini serta melakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang. Pihak yang diwawancarai berjumlah 20 informan terdiri dari unsur: pihak Desa, pengelola BUMdes, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data (Sugiyono, 2012 : 88).

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, berdasarkan model pendekatan *Top Down* yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Meter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut (Agustino, 2016:133) dan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan Ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang sudah cukup baik. Yaitu dengan mempertahankan kebudayaan masyarakat Desa Kareo meskipun perubahan era dan pengaruh budaya luar mulai masuk kepada masyarakat.

dalam mengelola dan membentuk pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes adalah untuk penyeragaman dalam pembentukan BUMDes di Desa Kareo, sehingga tidak ada perbedaan pembentukan dalam pengelolaan satu desa dengan desa lainnya. Sementara tujuan dari program BUMDes sendiri khususnya di Desa Kareo adalah sebagai penggerak motor ekonomi desa dan juga sebagai wadah bagi program pemerintah agar terkelola dengan baik. Tentu hal ini akan memudahkan desa dalam mengatur perekonomian desanya. Berdasarkan tujuan ini, pelaksanaan BUMDes di Desa Kareo belum mampu mengelola seluruh masyarakat desa Kareo karena masih terhambat akan dana dan fasilitas yang ada. Disamping itu, BUMDes juga tidak memiliki targetan khusus kapan ia bisa mengelola seluruh masyarakat desanya, sehingga program ini hanya berjalan apa adanya.

2) Sumber Daya Sumber daya dalam Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia (human resources) dan sumberdaya non manusia (non human resources). Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan BUMDes di Desa ini adalah Kareo, sumberdaya manusia yang sifatnya relawan dan tidak ada gaji tetap untuknya. Sehingga sangat sulit sekali dalam mencari orang-orang yang betul-

betul mau bekerja untuk desa. Karena bisa di lihat bahwa memang pada pelaksanaannya membutuhkan orang-orang yang benar-bener bekerja tanpa di bayar untuk kemajuan desa. Dan mencari orang-orang relawan pada era sekarang ini memang sangat sulit sekali, karena sekarang ini eranya dimana apapun diukur dengan materi. Namun bisa di lihat kompetensi pengurus bisa di lihat dari SDM nya, terkait sumberdaya finansial, dana yang dipakai untuk membangun BUMDes ini sebagian besar merupakan dana bantuan dari pemerintah. Sehingga target yang ingin di capai oleh pemerintah desa kareo belum sepenuhnya tercapai, karena dari partisipasi masyarakat yang kurang, belum semuanya melaksanakan program dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya program BUMDes tersebut. Jika program tersebut di kelola dengan baik dan lebih di tingkatkan lagi tidak menutup kemungkinan target yang ingin di capai semuanya terlaksana dengan baik.

- 3) Karakteristik Agen Pelaksana Karakteristik agen pelaksana dalam Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, bahwa hambatan atau kendala yang ada dalam program tersebut yaitu modal, dan relawan yang bekerja hanya orang-orang yang sama, jika hanya mengandalkan orang yang ada, bagaimana desa ingin maju dalam

menjalankan programnya. Tidak menutup kemungkinan masih banyak hambatan atau kendala yang di hadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah, bukan hanya modal melainkan hambatan-hambatan lainnya seperti armada pengangkut sampah, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat itu sendiri. Mereka juga sulit untuk menjual hasil olahan sampah yang di olah, oleh masyarakat itu sendiri, mereka tidak tahu untuk menjual dan bekerja sama dengan pihak penjual atau pihak swasta lainnya. Dan sebagian masyarakat tidak mengetahui atau tidak paham terhadap BUMDes di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada warga sekitar. Untuk sikap serta kejujuran petugas mereka bersikap baik dan jujur sesuai dengan kerjanya, tetapi dari sebagian mereka hanya bekerja di saat di perlukan saja, tidak terlalu mengurus kepentingan BUMDes semata dan sebagian mereka kebanyakan yang sibuk bekerja di luar oleh karena itu pengelolaannya hanya itu-itu saja yang melaksanakan belum sepenuhnya optimal.

- 4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana Sikap atau kecenderungan agen pelaksana dari program pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes yaitu sesuai dengan tugasnya. Jadi sesuai SOP yang di lakukan, kemudian pada saat melakukan survey dan penilaian mereka profesional dalam melaksanakan tugasnya, karena mengingat tujuan



yang mereka capai yaitu menjadikan desa yang bersih dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa, untuk bekerja sama melakukan program tersebut.

- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi Antar Organisasi dari program pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes dikatakan komunikasi yang dilakukan antar organisasi, yaitu sudah baik, melalui komunikasi lewat Whatsapp group. Jelas koordinasi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu pada BUMDes dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami. Namun komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak rutin dilakukan hanya 1 bulan sekali, dan untuk menyampaikan atau koordinasi dengan pelaksana sudah baik, apa yang harus di bicarakan di sampaikan melalui Whatsap group, sms atau telepon untuk membicarakan hal-hal terkait program kerja.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kareo bisa di lihat dari pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, dan penghasilan masyarakat masih minim. Dalam Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang,

yaitu hasil yang di dapatkan belum mendapatkan keuntungan dan belum ada yang masuk untuk kas Desa Kareo. Hasil yang di dapat juga masih sangat minim, hasil yang di dapat tidak nentu untuk satu minggu sekali kadang tidak ada atau tidak dapat penghasilan. program tersebut sudah memang sangat baik, karena bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang ekonomi walaupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya, dan bisa membantu masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan nya, tentunya program ini di dukung pula oleh pihak pengelola serta masyarakat sekitar. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saja masyarakat yang tidak mendukung akan ada nya program tersebut, sebagian masyarakat juga tidak mengetahui atau tidak paham terhadap program BUMDes yang ada di Desa, yang mengetahui hanya orang-orang yang dekat saja tidak semua masyarakat nya mengetahui.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan tentang Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, belum berjalan dengan baik di sebabkan oleh ; (1) Ukuran dan tujuan yang di jadikan tolak ukur suatu keberhasilan program

pengelolaan sampah pada BUMDes, yaitu dari ukuran yang sudah ditentukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan dari tujuan program yang ingin dicapai untuk saat ini masih bertahap, oleh karena itu masih banyak hambatan dalam program tersebut, di samping itu juga tidak memiliki targetan khusus kapan ia bisa mengelola seluruh masyarakat Desanya. (2) Sumberdaya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah pada BUMDes ini secara kuantitas sangat kurang, karena dalam penetapan pengurus BUMDes hanya mengambil satu orang penanggung jawab unit usaha tanpa ada staff pembantu di tiap unit usaha. Bisa dilihat dari SDM yang ada di Desa Kareo masih tergolong minim, karena di jaman era sekarang apapun di ukur dengan materi. (3) Karakteristik agen pelaksana yaitu Masih banyak nya hambatan atau kendala yang di hadapi dalam Pengelolaan Sampah Terpadu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), oleh karena itu sumber daya manusia yang masih minim sehingga petugas inti keteteran di saat melaksanakan tugas nya, Untuk keseluruhan belum sepenuhnya optimal, tidak menutup kemungkinan kurangnya modal dan lain-lain bisa menghambat pekerjaan dan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu dari segi pemahaman masyarakat terhadap BUMDes masih kurang karena kurangnya sosialisasi dari pengurus terhadap masyarakat yang ada di Desa kareo. Dan hasil dari olahan sampah masih sulit untuk di perjual belikan karena tidak adanya kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta lainnya. (4) Sikap dari pelaksana yaitu, Dalam komunikasi yang mereka lakukan

belum memiliki pola komunikasi yang baik dan tidak ada jadwal rutin pertemuan para Lembaga Desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya pada saat-saat urgent saja. Dan hanya satu bulan sekali itu pun hanya ada yang perlu di bicarakan dan tidak begitu 148 rutin satu bulan sekali, yang seharusnya di jadwalkan membuat pertemuan satu bulan sekali dan membuat laporan penanggung jawab. Dari respon masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan adanya program BUMDes tersebut karena dari pengurus sendiri hanya satu kampung yang melaksanakan dan sosialisasi yang di lakukan hanya sekali dan hanya pada satu kampung saja. (5) Komunikasi yang di lakukan oleh pelaksana yaitu melalui Whatsapp group saja dan tidak di lakukan pertemuan rutin satu bulan sekali, yang di lakukan hanya di saat urgent saja, tidak ada jadwal khusus dan tidak ada pertemuan rutin setiap bulannya. Oleh karena itu kurangnya sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi Pemerintah Daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes maupun sosialisasi Pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan di Desa Kareo hanya di lakukan satu kali saja, sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui mengenai BUMDes. (6) Belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes Kareo Mandiri Sejahtera di Desa Kareo, dikarenakan program kerja BUMDes lebih kearah pemberdayaan masyarakat bukan ke arah profit yang mengedepankan keuntungan tapi BUMDes Kareo mengelola sampah yang ada di permukiman warga masih dalam tahap pengembangan program. Dari kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa

di lihat dari tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat masih rendah, oleh karena itu sebagian dari mereka tidak tahu apa program yang telah di buat oleh pemerintah desa. Karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di Desa Kareo.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut; (1) Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Kareo. (2) Perlu adanya penambahan SDM pengurus/pengelola, karena SDM yang terbatas masih kurang untuk mengurus program tersebut. (3) Melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program BUMDes yang dilaksanakan oleh BUMDes sehingga tidak ada kesalah fahaman antara masyarakat dan Pemerintah Desa. (4) Agar lebih meningkatkan pendapatan BUMDes sehingga ada pemasukan untuk kas Desa Kareo peran BUMDes Kareo Mandiri Sejahtera di Kareo lebih terlihat sebagai badan usaha di Desa Kareo. (5) Melakukan pengembangan usaha dan program BUMDes atau unit-unit usaha lainnya di Desa Kareo sehingga para pelaksana operasional tidak hanya menjadi sukarelawan tapi ada penghasilan yang bisa didapat dari pelaksanaan program tersebut. (6) Masyarakat Desa Kareo seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program

BUMDes yang mengelola sampah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. (7) Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak swasta lainnya agar hasil dari pengolahan sampah bisa di perjual belikan dengan mudah. (8) Dari pengurus harus lebih di tingkatkan lagi untuk mengajak masyarakat nya agar ikut serta bergabung terhadap pengelolaan sampah yang ada di Desa Kareo

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AG. Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:..
- Chaizi Nasucha, 2014. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasi.
- Kurniawan, Luthfi j dan Mustafa Luthfi, 2012. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*. Setara Press.
- Malang. Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho D.Riant, 2011. *Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Public Policy Edisi Ketiga.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Negara.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.  
Sugiyono, 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

#### **Jurnal dan Skripsi :**

Dantika, Ovi Era Tama. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat.* Universitas Negeri Yogyakarta. <https://www.e-jurnal.com/2017/03/dampak-badan-usaha-milik-desa-bumdes.html>. Diakses pada 10 April 2020 pukul 10.15.

Wijanarko, Agung Septian. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran”.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/4487/1/file1.pdf>. Diakses pada 8 April 2020 pukul 01.45.

Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno, S. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu.* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3577>. Diakses pada 22 Mei 2020 pukul 02.59.

#### **Undang-Undang :**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.